



KEUANGAN DAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

PUNGKY SUMADI Sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah

Jakarta, 9 Maret 2018



Alur Pembahasan



1. Perkembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah Indonesia.

2. Tantangan Pelaksanaan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

3. Usulan *Quick Wins* Ekonomi dan Keuangan Syariah.



Perkembangan Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah

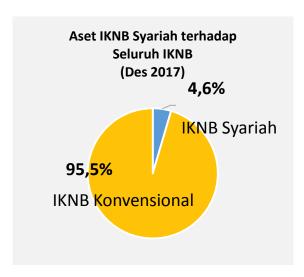




Aset perbankan syariah terus meningkat, namun **pangsa pasar masih kecil**.

Total aset IKNB Syariah naik dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir.





Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)



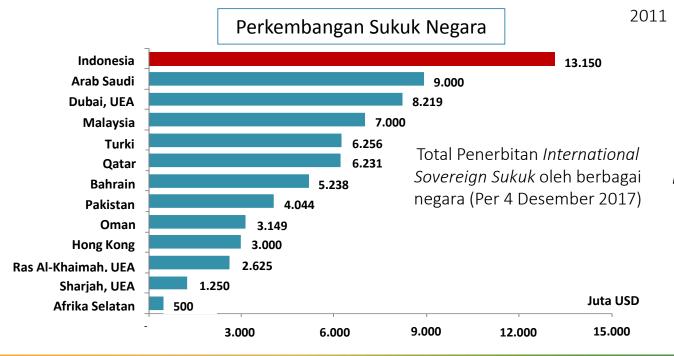
Perkembangan Pasar Modal Syariah

0



Pasar modal syariah berkembang baik dari tahun ke tahun.





Indonesia penerbit
terbesar untuk
International Sovereign
Sukuk dengan pangsa
pasar mencapai 19%
(per Desember 2017).

2013

2014

2015

2012

Pembiayaan Proyek Melalui Sukuk Negara

Jan-18

2016



Rp 16,8 Trilyun

- Rel kereta api.
- Jalan dan jembatan.
- Infrastruktur PTKIN, Asrama Haji, dan KUA.



Perkembangan Dana Sosial Keagamaan



Perkembangan Dana Sosial Keagamaan yang Terkumpul

Dana Haji
 Sebagian dana haji telah
 dimanfaatkan untuk pembiayaan
 pembangunan (Januari 2018).

Rp 99,6 Trilyun Dana Wakaf
 Pengumpulan dana wakaf masih minim
 (sampai dengan 2016).

Rp 22 Milyar

Dana Zakat

Nilai penghimpunan masih kecil dibandingkan potensinya (sampai dengan 2017). Rp 6 Trilyun Dana Infaq/Sedekah

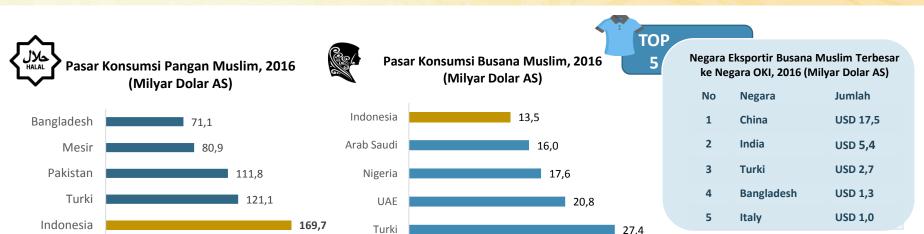
Disalurkan ke lima sektor, yakni ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial (sampai dengan 2016). Rp 1,4 Trilyun

Pengelolaan dana sosial keagamaan perlu diperbaiki untuk mendorong potensinya dalam pembiayaan pembangunan.



Perkembangan Ekonomi Syariah





Pasar Konsumsi Obat-obatan Halal, 2016

(Milyar Dolar AS)



Indonesia mengalami penurunan sebagai eksportir busana muslim global.



Indonesia telah masuk sebagai Top 5 destinasi pariwisata halal global.







 Kuwait
 9,6

 Indonesia
 9,7

 Qatar
 12,4

 UAE
 15,8

 Arab Saudi
 20,4



Indonesia masuk 5 besar **negara konsumen produk halal tertinggi di dunia.**









Sumber: State of Global Islamic Economy, 2017-18



Tantangan Pelaksanaan Ekonomi dan Keuangan Syariah





Perbankan Syariah

- Kapasitas Bank Syariah belum memungkinkan untuk menyalurkan dana APBN Non Gaji.
- 2. Belum ada bank syariah skala besar.
- 3. Belum ada bank investasi syariah.



Sukuk

- 1. Penerbitan sukuk terhambat oleh kebutuhan *underlying asset*.
- 2. Mahalnya biaya penerbitan.
- 3. Infrastruktur pasar belum optimal.



Dana Sosial Keagamaan

- Zakat sebagai pajak belum dapat direalisasikan.
- 2. Sosialisasi dan pengumpulan dana sosial keagamaan belum optimal.
- 3. Lembaga pengelola dana sosial keagamaan belum optimal dalam melakukan pengawasan, perencanaan dan pengendalian.
- 4. Pencatatan dan pendataan dana sosial keagamaan khususnya wakaf belum optimal.

Ekonomi Syariah



- Masih menjadi pasar konsumen produk halal terbesar (belum mampu menjadi produsen).
- 2. Proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama dan mahal.



Usulan Pengembangan Sektor Keuangan Syariah





Perbankan Syariah

Membentuk bank BUMN syariah skala besar. Usulan 3 (tiga) alternatif:

- a. Membentuk holding bank syariah.
- b. Merger Bank Syariah Mandiri,BNI Syariah, BRI Syariah, dan unit usaha syariah BTN.
- c. Mempertahankan 3 bank umum syariah yang ada dan disuntik modal untuk menambah kapasitas bank syariah.



Pasar Modal Syariah

- Meningkatkan pertumbuhan efek syariah (sukuk korporasi dan efek beragun aset syariah):
 - a. mendorong BUMN dan lembaga keuangan pemerintah (SMI, SMF, dan LPEI) menjadi emiten sukuk dan/atau saham, serta menerbitkan efek beragun aset syariah.
 - b. mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi pada sukuk korporasi.
- Mendorong penerbitan sukuk daerah.



IKNB Syariah

Perluasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan branding "Bank Wakaf Mikro" berbasis pesantren hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.



Usulan Pengembangan Sektor Dana Sosial Keagamaan





Zakat

- Reformasi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan:
 - Penetapan Perpres tentang pengumpulan zakat melalui pemotongan langsung gaji PNS.
 - Peningkatan pemanfaatan
 ZISWAF untuk pembangunan
 sanitasi & air minum serta
 perluasan ke sektor dan
 program penanggulangan
 kemiskinan lainnya.



Wakaf

 Pemerintah mengalokasikan dana kepada Badan Pusat Statistik di 2019 untuk sensus tanah wakaf.



Dana Haji

- Investasi langsung dan atau kerjasama dengan Tabung Haji Malaysia proyek infrastruktur brown-field PINA.
- Penyertaan modal atau Sub-Debt atau Liquidity Support di Bank Syariah.
- Pengiriman daging Dam Haji Tamattu dari Arab Saudi ke Indonesia kerjasama dengan IDB.
- Investasi akomodasi dari tanah wakaf Aceh Baitul Asyi di Mekkah.



Usulan Pengembangan Ekonomi Syariah



Penetapan paket kebijakan ekonomi, yang mencakup:

- a. Percepatan penyelesaian PP Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Percepatan PP tarif dan biaya sertifikasi halal.
- c. Penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah.

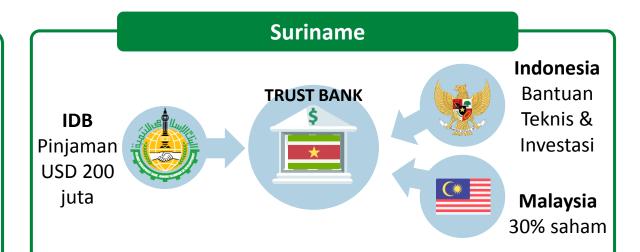


Usulan Pengembangan Kerjasama Internasional



Bantuan modal Bantuan Teknis IDB Benin Skema: Reverse Linkage

- Pemerintah Benin meminta bantuan Indonesia untuk mendirikan bank syariah pertama.
- Benin sudah menyampaikan surat permohonan kerjasama kepada Indonesia dan IDB (Juni 2017).
- Indonesia dan Benin masih menunggu tanggapan dari IDB.



- Trust Bank (bank swasta terbesar di Suriname) meminta Indonesia berinvestasi dan memberikan bantuan teknis di Trust Bank syariah.
- OJK dan bank-bank syariah siap memberikan bantuan teknis (spt studi banding, pelatihan & magang).
- Himbara diharapkan bisa menyuntikkan modal ke Trust Bank hanya USD 6 juta.
- Strategi, bentuk dan skema kerjasama perlu ditentukan serta perlu melibatkan IDB.
- Kemenlu akan bicarakan isu ini dalam Sidang Komisi Bersama Indonesia-Suriname.



TERIMA KASIH



